



**LAPORAN TATA KELOLA
DESEMBER 2019**

 **PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI**



PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI TAHUN 2019

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Penyusunan penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada :

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- b. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- c. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- d. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI.

- a. Meningkatkan kinerja BPR CAR dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR CAR.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.

- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Tahun 2019 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun untuk tahun 2019.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 8 (delapan) aspek sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

- 1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :
- b. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Marakarna	Komisaris Utama
2	Wahyudi	Komisaris

- c. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Liliana Wijaya	Direktur Utama
2	Edwin	Direktur
3	David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan

- d. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- e. Salah satu anggota Dewan Komisaris dengan salah satu Direksi memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan

atau hubungan keluarga. Akan tetapi kemampuannya bertindak untuk independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain hal, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para

anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR CAR.
- Direksi mengelola BPR CAR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Membereskan kredit bermasalah.
- Penghapusan Kredit Macet tahun 2019.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan/penetapan dan revisi Rencana Kerja dan Anggaran BPR CAR tahun 2019.
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.

- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- Persetujuan berbagai revisi dan ketentuan prosedur Operasional sesuai dengan wewenangnya.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal dan Manajemen Risiko

Struktur keanggotaan keahlian dan independensi Audit Internal.

1. Audit Internal

Pejabat Eksekutif : Susanti Sari Devi

Anggota : Erni Aprilda

- Pengangkatan PE Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama.
- Audit Internal berasal dari Karyawan BPR CAR yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pemantau Risiko

Pemantau risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja telah memberikan perlindungan terhadap seluruh risiko BPR.

PE Manajemen Risiko : R Dina Risdiana

- Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Pemantau Risiko berpedoman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

3. Tugas dan Tanggungjawab

Membantu dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan

tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik dan dapat meminimalisir risiko.

4. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola Penerapan manajemen risiko masih perlu dilakukan perbaikan, seperti kebijakan bank dalam penetapan limit, penetapan risk appetite dan risk tolerance, dan pedoman kerja lainnya.

5. Program kerja Komite dan realisasinya

Modal inti < 50 Milyar maka untuk BPR dengan modal inti tersebut tidak wajib menggunakan Fungsi Komite.

PE Audit Internal dan PE Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SPO Tata kelola BPR CAR.

c. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Telah memiliki Kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan.
2. Selama ini belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi tidak mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan keuntungan BPR. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

Sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR dengan modal inti kurang dari 50 M (lima puluh milyar rupiah) telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Audit Intern.

1. Penerapan Fungsi kepatuhan.

- Penunjukkan Dewan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan pemantau risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan pemantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris berdasarkan laporan rapat umum pemegang saham.
- Direksi dan pemantauan Risiko telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Audit Internal serta pemantau risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO), peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Audit intern telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan.
- Audit intern dalam melakukan pemeriksaan berpedoman pada kebijakan dan prosedur Audit Intern, seperti SPO Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Pemantuan Risiko.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- BPR CAR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR CAR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

e. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko dalam pengendalian Risiko di bank.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- BPR CAR menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan pengkinian sesuai dengan Kebijakan Risiko yang terbaru.

f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau Batas Pemberian Maksimum Kredit (BMPK).

1. BPR CAR memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Dalam memberikan kredit kepada debitur BPR CAR selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. BPR CAR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. BPR CAR akan menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	Rp. 1.646.905
2	Kepada Debitur Terbesar	25	Rp. 3.292.191

g. Rencana Bisnis Bank

1. Target, realisasi dan pencapaian di tahun 2019 :

	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
Aset	204.554.095	201.272.395	98.40%
Tabungan	7.310.813	7.537.414	103.10%
Deposito	180.496.947	176.259.196	97.65%
Kredit	108.328.386	107.320.526	99.07%

Pada Aset di tahun 2019 target sebesar 204.554.095 ribu, terealisasi sebesar Rp. 201.272.395 ribu pencapaian 98.40 %.

Tabungan sebesar 7.310.813 ribu, terealisasi sebesar Rp. 7.537.414 ribu pencapaian 103.10 %.

Deposito sebesar 180.496.947 ribu, terealisasi sebesar Rp. 176.259.196 ribu pencapaian 97.65 %.

Kredit sebesar 108.328.386 ribu, terealisasi sebesar Rp. 107.320.526 ribu pencapaian 99.07 %

	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
KPMM	17.34 %	19.96 %	115.10 %
Cash Ratio	9.20 %	9.34 %	101.52 %
LDR	55.06 %	55.49 %	100.79 %

Berdasarkan evaluasi kinerja di Desember 2019

Rasio KPMM terealisasi 19.96 % dari target 17.34 % pencapaian 115.10 %.

Rasio Cash Ratio terealisasi 9.34 %, dari Target 9.20 % pencapaian 101.52 %.

Rasio LDR teralisasi 55.49 %, dari Target 55.06 % pencapaian 100.79 %.

2. Rencana jangka pendek tahun 2020.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020.

- Potensi stabilnya tingkat suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi global & Indonesia yang berdampak langsung terhadap perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi terjadi peningkatan kredit bermasalah.
- Tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR CAR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- BPR CAR akan lebih mengutamakan untuk pertumbuhan penyaluran kredit yang selama ini relative stagnan dengan pertumbuhan yang relative rendah tercermin dari LDR yang sangat rendah (dibawah 60%)

di tahun 2019, untuk tahun 2020 Bank memproyeksikan LDR mencapai diatas 60% dengan demikian diharapkan laba Bank bisa bertumbuh di tahun 2020.

- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO) dan secara bertahap memperbaiki rasio NPL.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan.
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.

3. Rencana jangka menengah tahun 2020.

a. Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

b. Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Central Artha Rezeki.

c. Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM BPR CAR melalui *Competency Based Human Resources Management*.

h. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan BPR CAR telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. BPR CAR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
3. BPR CAR telah menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SPO.
4. Laporan Penanganan dan Penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan.
5. BPR memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat berupa website BPR CAR.
6. Di tahun 2019 BPR CAR telah menyusun SPO Payment Point Online Bank, SPO Teknologi Informasi, SPO Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan Bank (PKPPB), dan SPO Pelaporan Dan Laporan Bulanan BPR melalui sistem APOLO.
7. Menyampaikan laporan-laporan lainnya yang diwajibkan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, PPATK, Direktorat Jendral Pajak secara berkala.

1. Susunan Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Central Artha Rezeki adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Marakana	Komisaris Utama
Wahyudi	Komisaris

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris PT. BPR Central Artha Rezeki tidak memiliki saham pada PT. BPR Central Artha Rezeki, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR CAR	Kepemilikan Saham BPR CAR	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Marakana	Komut	99.57 %	×	×	×	√
Wahyudi	Komisaris	×	×	×	×	×
Liliana Wijaya	Direktur Utama	0.43%	×	×	×	×
Edwin	Direktur	×	×	×	×	×
David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan	×	×	×	×	×

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris dengan komisaris Utama BPR CAR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris BPR CAR, merupakan komisaris independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan komisaris lainnya, dan dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan dan juga sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi BPR CAR tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

- Dewan Komisaris dan salah satu diantara Direksi BPR CAR memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Mararakna	Komut		√	√			√			√		√	
Wahyudi	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Liliana Wijaya	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Edwin	Direktur	√		√		√		√		√		√	
David Febriano Timothy R	Direktur Kepatuhan	√		√		√		√		√		√	

8. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk transportasi, kesehatan, sewa mobil, uang saku pelatihan, uang Certif, tunjangan Jabatan, pulsa Hp dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, all tantiem dll)	2	Rp 816.335.000,-	3	Rp. 2.119.000.000,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp. 13.248.924,-	3	Rp. 424.511.896,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2 orang	1 orang
Rp 500 juta ke bawah	-	1 orang

9. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR CAR dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

10. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4.23 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.08 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 5.98 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	53.795.000	9.000.000
2	Direksi	83.000.000	40.000.000
3	Pegawai	16.500.000	3.900.000

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 kali dalam setahun.

12. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR CAR selama tahun 2019 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

13. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Central Artha Rezeki, selama tahun 2019 berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah :

No	Nama Nasabah	Nominal	Baki Debet	Keterangan
1	Phang Khiuk Njong	Rp. 152.050.000,-	Rp. 152.050.000,-	Kantor Pusat BSD
2	Ir. Lukas Tjahjadi	Rp. 650.000.000,-	Rp. 650.000.000,-	Kantor Pusat BSD
3	PT. Yujin Digital	Rp. 428.400.000,-	Rp. 428.400.000,-	Kantor Pusat BSD
4	PT. Rubber Tech	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 1.250.000.000,-	Kantor Pusat BSD
5	Ketiana Hartono	Rp. 161.734.309,-	Rp. 161.734.309,-	Kantor Pusat BSD
6	Andy Cahyady	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	Kantor Pusat BSD
7	Kartina Wanandhi	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	Kantor Pusat BSD
8	Sutopo Natuli	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Kantor Cabang Bogor

Proses Lelang yang dilakukan selama tahun 2019 :

No	Nama Nasabah	Keterangan	KPKNL
1	Yendra Jong	Kantor Pusat BSD	KPKNL Tangerang, Bekasi, Bogor
2	Fifie Gunawati Kiongo	Kantor Pusat BSD	KPKNL Jakarta Barat
3	Doni Tarutung	Kantor Pusat BSD	KPKNL Bogor
4	Sutopo Natuli	Cabang Bogor	KPKNL Bogor
5	Onih Nasiah	Cabang Bogor	KPKNL Bogor
6	Lilis Sumiati	Cabang Bogor	KPKNL Bogor
7	Agus Salim	Cabang Jakarta Utara	KPKNL Jakarta Utara
8	Candra Budi	Cabang Jakarta Barat	KPKNL Tangerang

14. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 4/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, BPR CAR telah menetapkan kebijakan untuk memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemilik. Kebijakan Terkait Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 021/BPR.CAR/SKD/07/2018 tanggal 02 Juli 2018. BPR CAR selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR CAR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha Rezeki periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.57 dengan prediksi Sangat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.21	0.24
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.41	0.21
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.10	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	1.63	0.16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.78	0.18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.20	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.15	0.22
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.25	0.09
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	1.00	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.00	0.15

	Nilai Komposit	100.00%		1.57
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Central Artha Rezeki, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Central Artha Rezeki tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Central Artha Rezeki

Tangerang Selatan, 29 April 2020

Menyetujui,



Liliana Wijaya
Direktur Utama



David Febriano Timothy R
Direktur Kepatuhan

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (b)	Peringkat (b)	Nilai (b) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.21	0.24	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.41	0.21	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0	BPR CAR memiliki modal inti dibawah 50 Milyar
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.10	0.21	Selama ini belum terjadi benturan kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	1.63	0.16	<i>Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.78	0.18	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum dan menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.20	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan OJK
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.15	0.22	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai dan belum secara maksimal.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.25	0.09	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	1.00	0.08	Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencanna kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.00	0.15	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT.BPR Central Artha Rezeki, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
	Nilai Komposit	100.00%		1.57	Sangat Baik

**Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang
Diselenggarakan Selama Tahun 2019**

No	Tanggal	Keterangan
1	28 Februari 2019	Pembahasan tentang RBB, Kredit Bermasalah, Isu Strategis ,Evaluasi / Penetapan Strategis dan Evaluasi RBB BPR.
2	27 April 2019	Pembahasan tentang RBB, Kredit Bermasalah , SDM, Pengurus, Karyawan, Isu Strategis BPR, Evaluasi Kebijakan Strategis, Evaluasi RBB BPR, dan Proses Lelang.
3	29 Juni 2019	Pembahasan tentang RBB, SDM, Karyawan, Isu Strategis BPR, Kredit Bermasalah , Evaluasi / Penetapan kebijakan Strategis, Evaluasi RBB, dan Proses Lelang.
4	29 Agustus 2019	Pembahasan tentang Pengawasan RBB, SDM, Pengurus, Evaluasi SPO, SPO PKPPB, Karyawan, Kantor Cabang dan Kantor Kas, Isu Strategis BPR, Kredit Bermasalah, Evaluasi RBB, dan Nasabah Proses Lelang.
5	01 Oktober 2019	Pembahasan tentang Pengawasan RBB, SDM, Pengurus, Evaluasi SPO, Karyawan, Kredit Bermasalah, Kantor Cabang dan Kantor Kas, Isu Strategis BPR, Evaluasi RBB, dan Nasabah Proses Lelang.

Tabel 1